

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PROGRAM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI  
PERMASALAHAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Poppy Septia Arisha  
NPM : 147110610**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2019**

**EVALUASI PROGRAM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI  
PERMASALAHAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH  
DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Oleh  
**Poppy Septia Arisha**

Kata Kunci : Evaluasi Program, Kawasan Pemukiman Kumuh;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru. Indikator penilaian evaluasi yang dipergunakan meliputi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 38 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dikategorikan cukup baik. Adapun faktor penghambatnya yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lingkungan sehat perumahan. Selain itu masyarakat suka membuang sampah sembarangan, sehingga masih terjadi banjir di sekitar kawasan pemukiman kumuh.

**EVALUATION OF THE PEOPLE'S HOUSING AND PRIVATE  
VOCATIONAL SCHOOL OF PEKANBARU CITY SETTLEMENT IN  
OVERCOMING THE PROBLEM OF THE GRASS SETTLEMENT AREA IN  
PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**By  
Poppy Septia Arisha**

*Keywords: Program Evaluation, Slum Settlement Area;*

*This study aims to determine and evaluate the Program of Public Housing and Settlement Areas of Pekanbaru City in Overcoming the Problems of Slum Settlements in the City of Pekanbaru. Evaluation evaluation indicators used include effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes questionnaire lists as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the study site. The population and samples in this study were 38 people. The types and data collection techniques used consisted of, primary data collected using questionnaire list techniques and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Evaluation Program of the Public Housing Service and Settlement Area of Pekanbaru City in Overcoming the Problems of Slum Settlement Areas in Pekanbaru City was categorized quite well. The inhibiting factors are the Public Housing Office and Settlement Area which rarely informs the public about a healthy housing environment. In addition, the community likes to dispose of litter, so that there is still flooding around the slum area.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.



4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
9. Ayahanda dan Ibunda terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
10. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif

dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 3 September 2019  
Penulis  
Ttd.

Poppy Septia Arisha



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	xix
<b>ABSTRAK .....</b>	xx
<b>ABSTRACT .....</b>	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1. Tujuan penelitian .....	15
2. Kegunaan penelitian .....	15
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	17
A. Studi Kepustakaan .....	17
1. Konsep Administrasi .....	17
2. Konsep Organisasi .....	20
3. Konsep Manajemen .....	23
4. Konsep Kebijakan .....	25
5. Konsep Evaluasi .....	28
6. Kawasan Pemukiman Kumuh .....	34
B. Kerangka Pikir .....	39

C. Konsep Operasional.....	40
D. Operasionalisasi Variabel.....	42
E. Teknik Pengukuran.....	44
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.....	55
B. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.....	56
C. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.....	60
D. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kawasan Pemukiman.....	61
E. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.....	61
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Identitas Responden.....	65
1. Jenis Kelamin.....	65
2. Tingkat Umur.....	66
3. Pendidikan Responden.....	68
B. Hasil Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru. ....	70
1. Efektivitas.....	70



2. Kecukupan .....	77
3. Pemerataan .....	84
4. Responsivitas.....	92
5. Ketepatan .....	99
C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru. ....	108
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	112
<b>LAMPIRAN</b> .....	115

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Penetapan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 .....	9
I.2 : Jumlah Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	12
II.1 : Pelaksanaan Evaluasi dapat diukur dengan menggunakan Indikator Evaluasi menurut Duun (2003) .....	30
II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	43
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	49
III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	54
IV.1 : Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru. ....	62
IV.2 : Sarana dan Prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru. ....	63
V.1 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
V.2 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66

V.3 :	Distribusi Indentitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
V.4 :	Distribusi Indentitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	67
V.5 :	Distribusi Indentitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia .....	68
V.6 :	Distribusi Indentitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia.....	69
V.7 :	Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	72
V.8 :	Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	73
V.9 :	Data Sekunder Indikator Efektivitas Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	75
V.10:	Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	78
V.11:	Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	79



V.12: Data Sekunder Indikator Kecukupan Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	82
V.13: Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	85
V.14: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	86
V.15: Data Sekunder Indikator Pemerataan Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	89
V.16: Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	93
V.17: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	94
V.18: Data Sekunder Indikator Responsivitas Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	97
V.19: Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	99
V.20: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	101



V.21: Data Sekunder Indikator Ketepatan Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	104
V.22: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	105
V.23: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	107



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru .....	40
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner untuk Responden Pegawai tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	115
2. Daftar Kuisisioner untuk Responden Masyarakat tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	128
3. Daftar Wawancara penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	140
4. Daftar Data Telly Penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	142
5. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	144
6. SK Tim Penguji .....	157

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Administrasi tidak terlepas dari organisasi, yang merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk melaksanakan aktivitas kerjasama yang memanfaatkan sumber daya yang telah ada dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Massie mengatakan organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama (dalam Zulkfli 2009;14)

Melaksanakan administrasi berarti melaksanakan manajemen, yang mana merupakan inti dari administrasi itu sendiri, karena manajemen merupakan alat pelaksanaan utama dari administrasi pada sebuah organisasi. Dunia Organisasi tentu berbagai banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama berbagai kegiatan organisasi itu diadakan. Kebijakan dari pimpinan tentu harus dilaksanakan oleh anggota atau pegawai dari suatu organisasi itu sendiri, tetapi terkadang ada yang kebijakannya tersebut di berikan dari pimpinan kepada anggotanya. Dan salah satu kebijakan yang seharusnya menjadi sasaran dari suatu organisasi publik di dalam pemerintahan adalah pelaksanaan peraturan yang telah di tetapkan oleh daerahnya masing-masing.

Negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensial untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Herman Finer (dalam Syafiie, 2003;9).



Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Dasar pemikiran pemerintahan daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari : Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan Negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari yang namanya organisasi, organisasi merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh aktivitas kerjasama yang memanfaatkan sumberdaya yang telah ada dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan anantara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang disebut bawahan menurut Siagian (dalam Zulkifli,2005;127).

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi di butuhkan pula adanya administrasi yang baik guna untuk terciptanya good governance. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi di butuhkan pula adanya adminitrasi yang baik guna untuk terciptanya good governance. Adminitrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar adminitrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Siagian (2003;4) Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Hubungan antara Manajemen dengan sebuah Organisasi adalah sebuah proses, dimana manajemen adalah sebuah proses kegiatan mencapai tujuan melalui kerja sama antara manusia, rumusan tersebut mengandung adanya timbal balik antara kegiatan dan kerja sama disatu pihak dengan tujuan di pihak lain, dalam pencapaian sebuah organisasi dibutuhkan sebuah manajemen yang baik begitu juga sebaliknya untuk mendapatkan sebuah manajemen yang baik maka diperlukan sebuah organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang terampil, kreatif serta mampu bekerja secara tim untuk mewujudkan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh organisasi tersebut.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Arikunto (2004 : 10).

Istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan beberapa permasalahan yang belum mampu terselesaikan, salah satu permasalahan pokok negara berkembang ialah sarana dan prasarana permukiman penduduk yang masih tergolong padat dan kumuh. Permasalahan ini memberi dampak yang multi dimensi, diantaranya dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan, tatanan sosial budaya, lingkungan fisik, serta dimensi politis. Akibat yang ditimbulkan dari permukiman kumuh adalah meningkatnya tindakan kriminalitas yang tercipta dari rendahnya ekonomi masyarakat dan sulitnya mencari peluang kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah:

“Permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1



Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat.

Kawasan permukiman kumuh adalah sebuah Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. (sumber: wikipedia).

Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan.

Adapun kriteria daripada kawasan kumuh ini antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi.
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsisten yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
5. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, dll.
6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus.
7. Kuatnya gaya hidup pedesaan atau tradisional
8. Ditempati secara illegal,
9. Dan biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tidak kriminal.



Kriteria kawasan permukiman kumuh dalam kota, dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti : karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, bahwa kriteria fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Perumahan yang tidak teratur.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
3. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
4. Tingkat pendapatan masyarakat rendah.
5. Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap.
6. Tingkat pengangguran tinggi.
7. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.
8. Masyarakat terdiri dari berbagai berbagai suku bangsa dan golongan.
9. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada area yang sesuai dengan perencanaan perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk permukiman.

Sedangkan pemukiman yang bersih dan layak huni atau pemukiman yang sehat adalah pemukiman yang tertata rapi dan pembangunannya sesuai dengan perencanaan, serta pemukiman ini mempunyai aksesibilitas yang baik. Adapun kriteria pemukiman yang layak dan sehat menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara)
2. Tersedia air bersih
3. Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya
4. Mempunyai aksesibilitas yang baik
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja
6. Tidak berada dibawah permukaan air setempat
7. Mempunyai kemiringan rata-rata.

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor migrasi. Peningkatan jumlah penduduk yang juga di ikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang dan penyediaan akan sarana dan prasarana permukiman.

Dari waktu ke waktu kebutuhan akan lahan di daerah perkotaan akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan akan lahan strategis untuk permukiman relatif tetap. Oleh karena itu penduduk di kota memanfaatkan lahan yang terbatas untuk dijadikan tempat permukiman tanpa memperhatikan lagi kualitas lingkungan permukimannya.

Pembangunan permukiman di lahan yang terbatas menimbulkan masalah alih fungsi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang semestinya. Daya dukung lingkungan yang kurang memadai juga akan menimbulkan masalah permukiman yaitu tumbuhnya permukiman kumuh tidak layak huni didaerah perkotaan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman.

Di indonesia penurunan kualitas lingkungan perumahan desa maupun kota banyak dijumpai pada daerah-daerah lingkungan padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan yang dirancang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota Metropolitan di Indonesia, dengan demikian, secara otomatis, perkembangan yang terjadi juga akan semakin tinggi, dan jumlah penduduk yang ada di kota Pekanbaru juga semakin hari semakin bertambah, berdasarkan Data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah masyarakat kota Pekanbaru saat ini mencapai angka 1 juta jiwa, dengan bertambahnya angka manusia yang memadati Kota Pekanbaru, maka secara otomatis juga akan memaksa fasilitas bangunan tempat tinggal harus di tingkatkan.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mencanangkan Pekanbaru akan bebas dari permasalahan kawasan kumuh, tetapi kenyataannya sampai pada saat ini realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah di lakukan.

Berdasarkan SK Walikota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (Lima) Kawasan Kumuh di masing-masing daerah, dan angka tersebut dapat di kategorikan cukup besar untuk Kota Pekanbaru.

Adapun lokasi yang menjadi kawasan kumuh yang di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota

Pekanbaru mencapai 94,10 Ha yang terbagi atas 16 kelurahan dalam 5 kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1 : Penetapan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017.**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan Per /Kelurahan	Total Luas Kawasan Kumuh
1	Kec Senapelan	Kampung Dalam	5.00 (Ha)	22.50 (Ha)
		Padang Terubuk	5.30 (Ha)	
		Kampung Bandar	9.50 (Ha)	
		Kampung Baru	2.70 (Ha)	
2	Kec Rumbai	Meranti Pandan	4.60 (Ha)	15.00 (Ha)
		Sri Meranti	10.40 (Ha)	
3	Kec Rumbai Pesisir	Lembah Sari	3.90 (Ha)	17.60 (Ha)
		Limbungan	8.30 (Ha)	
		Limbungan Baru	2.40 (Ha)	
		Lembah Damai	3.00 (Ha)	
4	Kec Pekanbaru Kota	Sukaramai	6.60 (Ha)	16.00 (Ha)
		Tanah Datar	6.30 (Ha)	
		Sumahilang	3.10 (Ha)	
5	Kec Limapuluh	Pesisir	6.40 (Ha)	23.00 (Ha)
		Rintis	9.50 (Ha)	
		Tanjung Rhu	7.10 (Ha)	

Sumber : *Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari 16 kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh oleh Walikota



Pekanbaru. Dari 16 kelurahan tersebut, peneliti hanya memilih satu kelurahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu Kelurahan Padang Terubuk.

Padang Terubuk merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Senapelan. Adapun luas Kelurahan Padang Terubuk adalah 1,54 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kelurahan Padang Terubuk yaitu berjumlah 8.002 orang, yang terdiri dari 4.034 orang laki-laki dan 3.968 orang perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 1.796 KK, serta dengan kepadatan penduduk yaitu 5.196 km<sup>2</sup>.

Adapun yang menjalankan sekaligus penanggungjawab dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di Kota Pekanbaru adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, dimana Tugas Pokok Dan Fungsi dari Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Bidang Pengawasan Kawasan Pemukiman yang tertera pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 95 Tahun 2016, Pasal 14 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan permukiman.
2. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
  - b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan,

- bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
  - f. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.
  - g. Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
  - h. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
  - j. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
  - k. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - l. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
  - m. Pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
  - n. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
  - o. Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
  - p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.

Adapun visi yang di tetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah : *“Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Yang Handal, Dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera”*.

Jumlah aparatur sipil Negara (ASN) yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dan adapun jumlah untuk Tenaga Harian Lepas (THL) adalah sebanyak 73 Orang pegawai, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru**

No	Kantor Dinas	Laki-Laki	Parempuan	Total
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	43 Orang	12 Orang	55 Orang
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	55 Orang	18 Orang	73 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>98 Orang</b>	<b>30 Orang</b>	<b>128 Orang</b>

Sumber : *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru adalah sebanyak 128 Orang pegawai, yakni Aparatur Sipil Negara berjumlah 55 orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 73 orang.

Adapun program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru yaitu “PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN”. Program ini dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, yang kemudian bekerjasama dengan CV. Matahari Riau Berjaya. Dalam merealisasikan program tersebut, adapun langkah-langkah kegiatan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman cenderung kumuh
2. Kegiatan pengendalian kawasan pemukiman kumuh
3. Penataan dan pembangunan kawasan pemukiman kumuh
4. Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman kumuh.

Berdasarkan hasil *Pra Survey* yang penulis lakukan di lapangan dan di dukung dengan SK Walikota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru yang telah menetapkan jumlah dan juga lokasi-lokasi kawasan kumuh yang ada di daerah Kota Pekanbaru, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut ini:

1. Masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru, yang terbagi dalam 5



kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Limapuluh. Ini artinya program “Lingkungan Sehat Perumahan” yang di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum terealisasi dengan baik.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menargetkan pembebasan Kota Pekanbaru dari permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh sejak tahun 2016, namun realisasinya sampai pada saat ini belum sesuai dengan apa yang telah menjadi target pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya, sehingga masih banyak kawasan permukiman kumuh, yang terbagi dalam 5 kecamatan.
3. Kurangnya perhatian pemerintah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terhadap situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, dimana keberadaan lokasi kawasan kumuh yang ada di Kota Pekanbaru masuk dalam kategori sangat tinggi, hal ini di buktikan dari ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi dalam 5 (Lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Limapuluh.

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan yang telah di paparkan pada latar belakang di atas, dan didukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi terkait dengan pelaksanaan atau penanganan permasalahan terkait dengan permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru,

dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian Usulan Penelitian ini dengan mengangkat judul “*Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang diatas serta fenomena-fenomena yang telah disajikan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin penulis teliti yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru. Masalah pokok yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk menganalisis sejauh mana Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.
- c. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingatkan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

##### 1. Konsep Administrasi

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005;23) Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi di dalam persepektif sebuah Proses proses.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafiie, 2006;14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Sufian (2014;108) berpendapat bahwasanya administrasi itu kegiatan dimana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut siagian (2006;7) mengatakan administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.



Charle A. Bear (dalam Wirman Syafri, 2012:3), mengatakan tidak ada satu hal dalam abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Di Italia disebut juga *amministrazione*. (Wirman Syafri, 2012:3)

Administrasi terbagi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Sementara administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. (Wirman Syafri, 2012:3-4).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:2)

Administrasi definisinya dibagi beberapa hal. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya dan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai beberapa unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilakukan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas empat, itu. Kedalam peralatan dan perengkapan juga termasuk pula waktu, tempat, perlatan, materi serta sarana lain. Ketiga, bahwa adminitrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena telah timbul berssama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial (Siagian. 2003;2-3).

Menurut Prajudi Atmosudirjo (2001:5) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisas. Sedangkan menurut Willy D.S. Voll (2013;4) administrasi (*administrare*) adalah mempunyai dua arti pertama, kegiatan catat mencatat, mereka atau kompleks jabatan-jabatan yang menyelenggarakan kegiatan pencatatan termaksud pada poin pertama.

Adminstrasi merupakan upaya sadar kerjasama antar manusia yang memiliki derajat rasionalitas yang tinggi dan akhirnya akan sampai pada sebuah titik yang dinamakan tujuan (dalam Wicaksono 2014;9)

Woodro Wilson (dalam Thoaha 2008;9) bahwa administrasi merupakan suatu bidang usaha (*a field of business*) dan harus dipisahkan dari politik. Pandangan lain di utarakan oleh Hadari Nawawi dalam (syafiie. 2003; 5) administrasi adalah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas jelas bahwa, administrasi negara dalam melayani harus membantu publik untuk memecahkan permasalahan publik dalam menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh birokrasi ataupun kantor pemerintahan yang ada. Karena pada dasarnya pelaksanaan kegiatan administrasi negara didasarkan oleh kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada Undang-Undang.

Jadi intinya, administrasi negara ini merupakan dimana sekumpulan orang yang bekerja sama dalam pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi publik secara efektif dan efisien. Dan administrasi negara yang bergerak dibidang pemerintahan, maka bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga akhirnya dapat menciptakan demokrasi yang baik dan tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang menjadi tujuan utama dari pemberian pelayanan.

## **2. Konsep Organisasi**

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional

Organisasi menurut Siagian (2003;6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut. Gaus (dalam Hamim, 2005:13).

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009 : 24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan,



penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Menurut Karl Weick (dalam Zulkifli 2005;129) “*Organization is defined as consensually validated grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked behaviors*”. Pendapat ini menunjukkan bahwa organisasi merupakan daya upaya untuk mencapai kesepakatan yang tepat untuk mengurangi ketidak jelasan dari hubungan perilaku yang pantas satu dengan yang lainnya.

Menurut James. AF. Stoner dan R. Edwar Freeman (dalam Amin Widjaja Tunggal 2002; 31) organisasi adalah dua atau lebih manusia yang bekerja bersama-sama dengan suatu cara yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau kumpulan tujuan.

Waldo (dalam hamim 2005;13) organisasi merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut.

Siswanto (2005;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama. Sementara E. Wight Bake (dalam Kusdi 2009;5) mendefinisikan lebih luas tentang organisasi yaitu sebagai berikut:

*“a continuing system of differentiated and coordinated humand activities utilizing, transforming and walding togather a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources in to a unique problem- solving whole engged in satisfyng particular human needs in interaction other system of human activities and resources in its environment”.*



Dapat diartikan: organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material, model, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Menurut Nawawi membagikan organisasi kedalam dua pengertian yakni organisasi dalam arti statis dan organisasi kedalam arti dinamis (Nawawi, 2008;9). Adapun organisasi dalam arti statis yaitu : Sebagai wadah berhimpun sejumlah manusia oleh karena memiliki kepentingan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa sifat statis terletak pada dua kondisi yaitu : setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah, serta posisi, status dan jabatan setiap individu cenderung permanen.

Kemudian pengertian organisasi dalam arti dinamis yang juga dikemukakan oleh Nawawi yaitu : Organisasi adalah proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa sifat dinamisnya sebuah organisasi terletak pada dua kondisi yaitu, kerjasama yang berlangsung secara berkelanjutan yang merupakan sebagai rangkaian kegiatan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien, serta interaksi antara manusia formal dan informal dalam sebuah organisasi yang tidak pernah sama dari waktu ke waktu. (Nawawi, 2008;10)

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang diserahi tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli dan Nurmasari 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian: (1) Manajemen sebagai proses, (2) Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, (3) Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*).

Menurut John D. Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan dalam siswanto (2005;1)

Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta atau data secara objektif kebenarannya (dalam Badrudin 2013;2)

Manajemn adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata George R. Terry, et.al. (2015;1)

Menurut Nick, et.al manajemen adalah “*The process used to accomplish organizational goals through planing organizing, directing, and controlling people and other organizational resources*”. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penegndalian orang-orang serta sumber daya organisasi (dalam Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah 2004;7).

Koonzt dan O'donnel (dalam Marnis, 2009;3) mengemukakan manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Siagian (2003;47) manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen diartikann sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) dalam Siswanto (2005;3)

Meri Parker Fole (dalam buku Ismail Solihin 2010;3) menegaskan bahwa pada dasarnya manajemen adalah “ *The art of getting things done through people*” (seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain).

Menurut David. H. Holt manajemen adalah (dalam Amin Widjaja Tunggal 2002;31) manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, dan

mengendalikan yang mencakup manusia, material, dan sumber daya keuangan dalam suatu lingkungan organisasi

Selanjutnya Hasibuan (2001;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: *Man, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.*

Menurut G.R Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organizing, actuating, dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula dalam Hamim (2003; 36)

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pembinaaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya.

#### **4. Konsep Kebijakan**

Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktipitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyesuaian agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.



Di Indonesia menggunakan istilah “*kebijaksanaan dan kebijakan*” dari terjemahan *polcy* yang diartikan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalankan dengan pengertian “*PUBLIK*” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan kebijaksanaan dengan kebijakan, yang membedakan istilah “*policy*” sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*discretion*” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Kata kebijakan secara etimologi berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “negara kota”. Dalam bahasa Latin yaitu politik atau negara. Bahasa Inggris lama (*middle english*) dinilai berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2001)

Kemudian dalam bahasa Indonesia “kata kebijakan dan kebijaksanaan” bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “*wisdom*” asal katanya “*wise*”. Dari pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar “pintar atau cerdas (*smart*).

Pada saat persoalan publik menjadi lebih kompleks, tidak ada satupun masalah hanya di pandang hanya “satu” aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai

lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan berlaku secara cepat.

Selanjutnya dapat dilihat defenisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latief (2005;88) yang menegemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu, perilaku baik pejabat ataupun perorangan, kelompok kekuatan politik dan kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambta-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Anderson dalam Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa, kebijakan merupakan penegembang yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturinya. Sehingga kebijak tersebut dapat dikatan bahwa:

- 1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud dan pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
- 4) Kebijakan pemerintah bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
- 5) Kebijakan pemerintah dalam artian positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Menurut Raden Imam Al-Hafis dan Zaini Ali (2015;4) kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Menurut Charles O Jones (2001;47) kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) Tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

## 5. Konsep Evaluasi

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejahtera mana tujuan di capai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dengan “kenyataan. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Subarsono (2005 : 123) alasan evaluasi kebijakan public adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, (2) mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, (3) memenuhi aspek akuntabilitas, (4) menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan, (5) agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Adapun menurut Ndraha evaluasi merupakan proses 30 perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndaraha, 2000:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan public, guna untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejahtera mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dengan” kenyataan. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Arikunto dan Cepi dalam Afifudin (2013;251) Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Dunn ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni :

1. Evaluasi semu (*pseudoevaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menyangkan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, dan masyarakat.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan
3. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desion theoretic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara ekspelisis diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

Untuk menilai suatu keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Menurut Dunn (2003;49) mencakup lima indikator adalah:



**Tabel II.1: Pelaksanaan Evaluasi dapat di ukur dengan menggunakan Indikator Evaluasi menurut Duun (2003).**

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang diinginkan telah tercapai dalam memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada ke kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Resposivitas	Apakah hasil kebijakan preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Wilian N Duun 2003.

Adapun menurut Ndaraha dalam buku konsep Administrasi dan Administrasi Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses 30 perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 2000:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan

perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dunn, 2003;608).

Menurut Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Menurut pendapat diatas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan keluaran. Evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013;126), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda

4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126) seperti yang telah sebutkan di atas dapat di kembangkan dalam masing-masing pengertiannya, yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dun mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

c. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003: 434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif , efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas

Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

e. Ketepatan

Ketepatan menunjuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan hubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substantif tujuan bukan cara atau instrument untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Nugroho, 2008;184)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan



seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

#### **6. Konsep Kawasan Pemukiman Kumuh**

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian prinsip mereka harus hemat dalam arti yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan sistem strukturnya (Sobirin, 2001:41).

Akibatnya, muncul permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Dalam berbagai literatur dapat dilihat berbagai kriteria dalam menentukan kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan permukiman. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan Farid Kurniawan, 2000:8-9), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu :

1. Kondisi bangunan atau rumah,
2. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan,
3. Kerentanan status penduduk, dan
4. Berdasarkan aspek pendukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut maka studi tersebut menentukan tiga skala permukiman kumuh, yaitu tidak kumuh, kumuh dan sangat kumuh.

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitek tersebut, Laboratorium Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya (Rudiyantono, 2008:8), hanya menentukan dua standart permukiman kumuh, yaitu :

1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari stuktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan dan tatanan bangunan.
2. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti

kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman

Johan Silas, seorang pakar dalam bidang arsitektur dan permukiman kumuh (Titisari dan Farid Kurniawan, 2000:8), menjelaskan bahwasanya kriteria pokok untuk menentukan permukiman kumuh/marjinal adalah: bila berada di lokasi yang ilegal, dengan keadaan fisiknya yang sub standar; penghasilan penghuni amat rendah (miskin), tak dapat dilayani berbagai fasilitas kota; dan tidak diingini kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan).

Berdasarkan kriteria Silas tersebut, aspek legalitas juga merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kekumuhan suatu wilayah selain buruknya kondisi kualitas lingkungan yang ada. Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya permukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya adalah permukiman.

Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu house dan land settlement. Permukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi (Kurniasih, 2007).

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengkata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan (Kurniasih, 2007).

Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 2002 tentang perumahan dan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Masrun (2009) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan.



Gambaran lingkungan kumuh, (Khomarudin, 2001) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan,
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,
3. Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan,
4. Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni,
5. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan,
6. Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan),
7. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan),
8. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal, 9. Pendidikan masyarakat rendah.

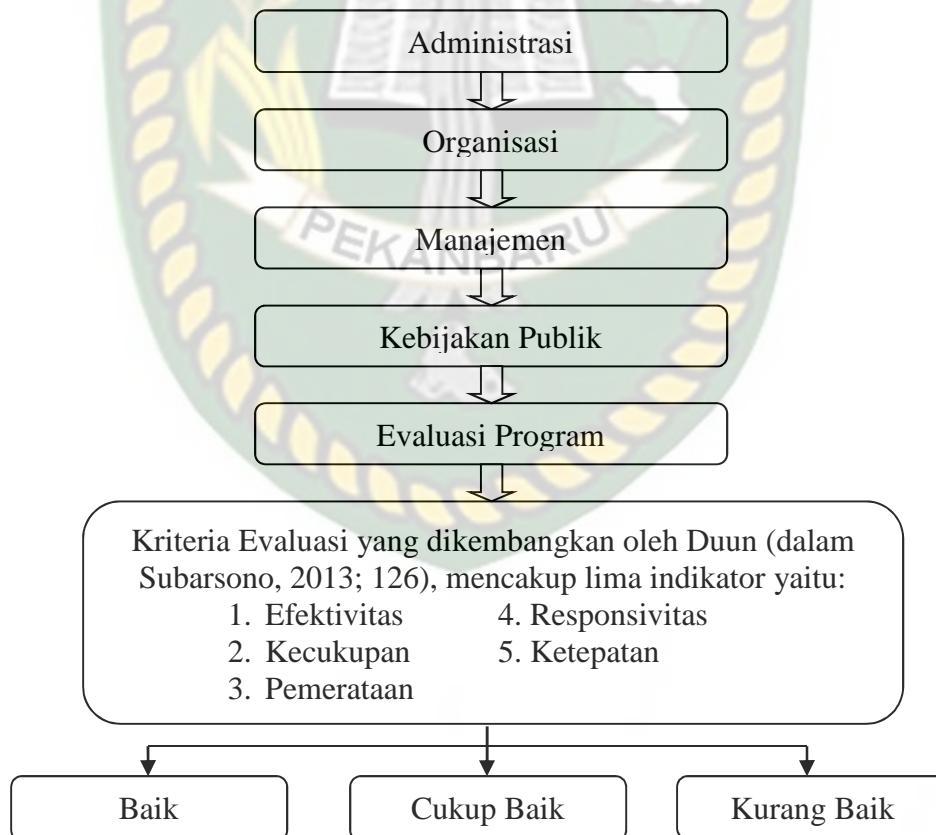
Dalam perkembangannya pertumbuhan permukiman kumuh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Doxiadis (2001), disebutkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. *Growth of density* (pertambahan penduduk) Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.
2. *Urbanization* (Urbanisasi) Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan kota.

## B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikiran ini di susun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan buatan sendiri dengan panduan ataupun teori yang di gunakan sebagai bahan untuk mengukur berhasil atau tidaknya penelitian. Berdasarkan kajian teori yang diterangkan, maka gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.**



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018.

### C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut :

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4. Kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seleralnya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai secara berkala apa yang telah dihasilkan melalui pengukuran indikator kinerja utama untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama dalam program lingkungan sehat perumahan.

6. Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2013; 126)

adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

c. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003: 434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas

Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang



menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

e. Ketepatan

Ketepatan menunjuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan hubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substantif tujuan bukan cara atau instrument untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional Variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat di amati (Anwar, 2003:74). Sedangkan pengertian lain terkait dengan Operasional Variabel adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian dilapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat di amati dengan kata-kata yang dapat di uji dan diketahui kebenarannya (Singarimbun, 2007:103).

Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Secara umum istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ) dan penilaian ( <i>assessment</i> ), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dunn, 2003:608).	Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.	1. Efektivitas	a. Pembentukan Program Mengatasi Pemukiman Kumuh. b. Pelaksanaan Sosialisasi Program.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Kecukupan	a. Pelaksanaan Program Di Lapangan. b. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Masyarakat Di Pemukiman Kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Pemerataan	a. Pelaksanaan Program Dilakukan secara merata diseluruh lokasi pemukiman kumuh. b. Melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan pemukiman kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Responsivitas	a. Melakukan Analisis Terhadap Perkembangan Kawasan Pemukiman Kumuh. b. Melakukan Tindakan Pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan pemukiman kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Ketepatan	a. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman cenderung kumuh. b. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018

### E. Teknik Pengukuran

Teknik Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik (3 Skor), Cukup Baik (2 Skor), dan yang terakhir adalah Kurang Baik (1 Skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini:

Baik	Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru berada pada skala pengukuran di antara 67%-100%
Cukup Baik	Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru berada pada skala pengukuran di antara 34% - 66%
Kurang Baik	Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru berada pada skala pengukuran di antara 0% - 33%

### 1. Efektivitas

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala pengukuran 67% - 100%.
- Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala pengukuran 34% - 66%.
- Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala pengukuran 0% - 33%.

### 2. Kecukupan.

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala pengukuran 67% - 100%
- Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala pengukuran 34% - 66%
- Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala pengukuran 0% - 33%

### 3. Pemerataan

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala pengukuran 67% - 100%



Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan berada pada skala pengukuran 0% - 33%

#### 4. Responsivitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala pengukuran 0% - 33%

#### 5. Ketepatan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala pengukuran 0% - 33%

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kota Pekanbaru, tepatnya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan Parit Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah didasari dengan fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan, dimana penulis ingin melakukan penelitian mengenai program Lingkungan Sehat Perumahan dalam rangka mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Dimana berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, permasalahan kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru sudah dibuat rancangan pembebasan Kota Pekanbaru dari kawasan pemukiman kumuh mulai tahun 2016, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat banyak kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Selain itu di Kelurahan Padang Terubuk masih banyak sampah yang dibuang sembarangan serta ada beberapa rumah yang masih terkena banjir.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dan Masyarakat.

## 2. Sampel

Sampel menurut Sugiono (2007:91) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili). maka yang menjadi sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.**

No	Subjek	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Sekretaris	1	1	100%
3	Kasubbag Perencanaan	1	1	100%
4	Kasubbag Umum	1	1	100%
5	Kabid Kawasan Permukiman	1	1	100%
6	Kasi Perencanaan	1	1	100%
7	Kasi Infrastruktur	1	1	100%
8	Kasi Peningkatan Kualitas	1	1	100%
9	Masyarakat	30	30	100%
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018.*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*, dimana menurut Sugiyono (2009:96) *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan sampel ditentukan minimal 30 orang berdasarkan teori *Insidental Sampling* menurut Sugiyono (2009:96) bahwa untuk penelitian kuantitatif, sampel minimal 30 orang.

Teknik penarikan *Insidental Sampling* ini ditujukan untuk masyarakat. Selanjutnya, untuk pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan karena jumlah pegawai yang menjadi sampel penelitian hanya sedikit, yakni berjumlah 8 orang.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden



- b. Tanggapan responden tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan

responden terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Apabila wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009;82) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

**H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal kegiatan penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru ini dimulai dari tahun 2018 bulan Desember dan berakhir di tahun 2019 bulan Mei. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■																
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, telah ditetapkan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah membantu Gubernur Riau melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengacu pada uraian tersebut, pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas Perkimtan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu pelayanan:

- **Penyelenggaraan Perumahan**, yang meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan.
- **Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**, yang dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman yang telah ada, pembangunan kawasan permukiman baru atau pembangunan kembali kawasan permukiman dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan : perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.
- **Penyelenggaraan Pertanahan**, yang meliputi perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, inventarisasi tanah ulayat/adat, identifikasi dan fasilitasi sengketa tanah maupun ganti rugi tanah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

#### **B. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 telah ditetapkan Visi Provinsi Riau Berikut ini:

## Visi

**“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemanfaatan Aparatur.”**

Selanjutnya terhadap Visi Provinsi Riau dianalisis rumusan, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

## Misi I

**“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.”**

### **1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman**

Sasaran:

- Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi
- Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Strategi:

- Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman
- Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh

Arah Kebijakan:

- Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi

- Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh Yang Menjadi Kewenangan Provinsi

## **2. Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman**

Sasaran:

- Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan;

Strategi:

- Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman

Arah Kebijakan;

- Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman Perkotaan di 12 Kabupaten/ Kota Provinsi Riau.

### **Misi II**

**“Menurunkan Kemiskinan.”**

#### **1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin**

Sasaran:

- Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat

Strategi:

- Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin

Arah Kebijakan:

- Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat



### Misi III

**“Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik.”**

#### **1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan**

Sasaran:

- Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan

Strategi:

- Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum

Arah Kebijakan:

- Percepatan Pelayanan Dalam Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum.

#### **2. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat**

**Daerah**

Sasaran:

- Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah

Strategi:

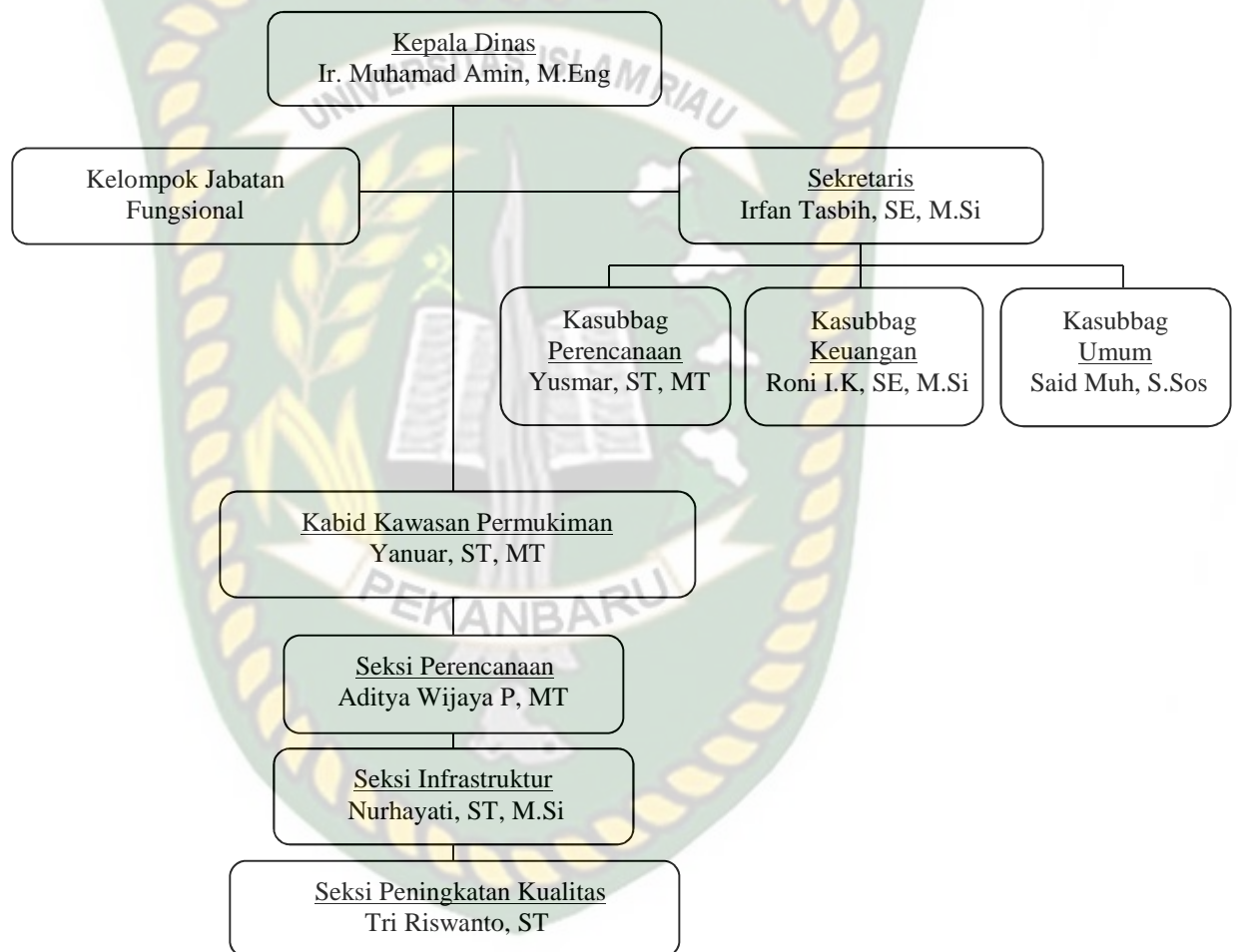
- Pemantapan Tata Kelola dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Arah Kebijakan:

- Penguatan Kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan aparatur.

### C. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

**Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru**



Sumber: Data Penelitian, 2019.

#### **D. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kawasan Permukiman**

- 1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis, Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kawasan Permukiman;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman;
  - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **E. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah. Terkait hal tersebut diatas, berikut ini data sumber daya manusia atau data kepegawaian pejabat struktural di

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 : Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**

No	Jabatan	Nama	Golongan
1	Kepala Dinas	Ir. Muhamad Amin, M.Eng	IV/b
2	Sekretaris	Irfan Tasbih, SE, M.Si	IV/b
3	Kasubbag Perencanaan Program	Yulismar, ST, MT	Penata Tk.I III/d
4	Kasubbag Keuangan	Roni Indrakusuma, SE, M.Si	IV/a
5	Kasubbag Umum	Said Mukhsin, S.Sos	III/d
6	Kabid Perumahan	Ir. Armansyah Aniputra, MT	IV/b
7	Kabid Sarana Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Imam Subroto, ST	Penata Tk.I III/d
8	Kabid Pertanahan	Irwan Suryawan, S.Sos, M.IP	IV/a
9	Kabid Kawasan Permukiman	Yanuar, ST, MT	IV/b
10	Kasi Perencanaan	Aditya Wijaya Raisnur P, MT	III/b
11	Kasi Infrastruktur	Nurhayati, ST, M.Si	III/c
12	Kasi Peningkatan Kualitas	Tri Riswanto, ST	III/b

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pejabat struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berjumlah 12 orang. Dari keseluruhan pejabat struktural diatas terlihat semuanya merupakan lulusan sarjana dan beberapa magister serta memiliki golongan yang cukup tinggi. Maka dari itu diharapkan mereka dapat menunjukkan kinerjanya yang lebih baik lagi, khususnya dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, organisasi merupakan suatu penggabungan benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu



tujuan yang diinginkan. Adapun data asset yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2: Sarana dan Prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Tanah Gedung Kantor	986	M2
2	Kendaraan Roda Empat	35	Unit
3	Kendaraan Roda Dua	37	Unit
4	Filling Kabinet	29	Unit
5	Kursi	225	Unit
6	Laptop	57	Unit
7	Lemari	45	Unit
8	Mesin Tik	15	Unit
9	Meja Computer	34	Unit
10	Monitor	9	Unit
11	Papan Struktur	11	Unit
12	Wireless	14	Unit
13	Komputer	54	Unit
14	UPS/Stabilizer	27	Unit
15	TV	13	Unit
16	Rak TV	12	Unit
17	Mesin Fotocopy	4	Unit
18	OHP	9	Unit
19	Rak Arsip	40	Unit
20	Printer	60	Unit
21	Rak Kertas	17	Unit
22	Dispenser	20	Unit
23	Hard Disk Eksternal	15	Unit
24	Kulkas	7	Unit
25	Rolling Filling	4	Unit
26	Scanner	12	Unit
27	AC	35	Unit
28	Mesin Potong Rumput	4	Unit
29	Sofa/Kursi Tamu	10	Unit
30	Gorden	8	Unit
31	Tiang Bendera	1	Unit
32	Tabung Racun Api	8	Unit
33	Mesin Absensi	44	Unit
34	Mesin Pompa Air	4	Unit
35	Plang Nama Kantor	2	Unit
36	White Board	8	Unit

1	2	3	4
37	Pot Bunga	34	Unit
38	Meja Kerja	94	Unit
39	Mesin Penghancur Kertas	6	Unit
40	Penunjuk Waktu	6	Unit
41	Brankas	1	Unit
42	Terali	1	Unit
43	Gambar/Ukiran	9	Unit
44	Tempat Tidur	8	Unit
45	Tangki Air	10	Unit
46	Tower Air	2	Unit
47	Instalasi TV/Listrik	4	Unit
48	Jaringan Computer	3	Unit
49	Instalasi Telepon	1	Unit
50	Jaringan Internet	1	Unit
51	Handy Camp	8	Unit
52	Server	4	Unit
53	Kamera	10	Unit
54	Megaphone	12	Unit

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total sarana dan prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berjumlah 54 jenis barang, dan ini tergolong sangat cukup memadai untuk kelangsungan kerja seluruh sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Sehingga tidak menghalangi serta menghambat kerja para pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk bekerja lebih baik lagi demi kesejahteraan bersama, khususnya dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah delapan orang pegawai dan tiga puluh orang masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

##### 1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Kota Pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	7	88%
2	Perempuan	1	12%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

*Sumber* : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden pegawai dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru terdiri dari 7 orang jenis kelamin laki-laki (88%) dan 1 orang jenis kelamin perempuan (12%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin pegawai di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 88%.

**Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	20	67%
2	Perempuan	10	33%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden masyarakat dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru terdiri dari 20 orang jenis kelamin laki-laki (67%) dan 10 orang jenis kelamin perempuan (33%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin masyarakat di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 67%.

## 2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru terdiri dari dua tingkat pendidikan yaitu S1 dan S2. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi



kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	S1	1	12%
2	S2	7	88%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru terdiri dari 1 orang pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 (12%), dan 7 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan S2 (88%). Dari uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan pegawai di dominasi oleh lulusan S2 yaitu dengan persentase 88%.

**Tabel V.4 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTP	3	10%
2	SLTA	22	74%
3	Diploma	1	3%
4	Sarjana	4	13%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru terdiri dari 22 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA (74%) jumlah tertinggi dan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 1 orang (3%) jumlah terendah. Dari uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan masyarakat di dominasi oleh lulusan SLTA yaitu dengan persentase 74%.

### 3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	1	12%
2	31 – 40	2	25%
3	41 – 50	5	63%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru yang berada pada usia 20-30 berjumlah 1 orang (12%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 2 orang (25%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 5 orang (63%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden pegawai yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun.

**Tabel V.6 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	4	13%
2	31 – 40	10	33%
3	41 – 50	16	54%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru yang berada pada usia 20-30 berjumlah 4 orang (13%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 10 orang (33%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 16 orang (54%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden masyarakat yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 41-50 Tahun.

## **B. Hasil Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

Pelayanan publik sangat penting dalam kehidupan sosial, apalagi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan. Keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan pada keberlangsungannya dapat dilihat pada penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada setiap unit kerja yang ada pada suatu organisasi. Dalam pencapaiannya sudah sudah tentu tidak terlepas dari adanya program yang bagus, khususnya dalam mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman), dan program lingkungan sehat perumahan.

Kawasan pemukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang cukup penting untuk dibahas, karena dewasa ini masyarakat banyak mengeluhkan



mengenai kawasan pemukiman kumuh yang tidak kunjung teratasi. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan mengenai kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, salah satu indikatornya adalah efektivitas. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pembentukan program Lingkungan Sehat Perumahan dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan sosialisasi program Lingkungan Sehat Perumahan dengan masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator efektivitas, dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Membentuk program untuk mengatasi pemukiman kumuh	8 (100%)	-	-	8
2	Sudah lama Dinas membentuk program tersebut	4 (50%)	4 (50%)	-	8
3	Program tersebut sudah bisa mengatasi kawasan kumuh	4 (50%)	4 (50%)	-	8
4	Melibatkan masyarakat dalam pembentukan program	6 (75%)	2 (25%)	-	8
5	Masyarakat senang dengan adanya program ini	8 (100%)	-	-	8
6	Sudah melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	8 (100%)	-	-	8
7	Tempat sosialisasi program dengan masyarakat dilakukan	4 (50%)	4 (50%)	-	8
8	Sering melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	4 (50%)	4 (50%)	-	8

1	2	3	4	5	6
9	Mengetahui apa yang dibahas dalam sosialisasi program	8 (100%)	-	-	8
	Jumlah	54	18	-	72
	Rata-rata	6	2	-	8
	Persentase	75%	25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator efektivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator efektivitas sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator efektivitas yang terdiri dari dua sub indikator, dengan sembilan item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini :

**Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membentuk program untuk mengatasi pemukiman kumuh	10 (33%)	20 (67%)	-	30
2	Sudah lama Dinas membentuk program tersebut	14 (47%)	10 (33%)	6 (20%)	30
3	Program tersebut sudah bisa mengatasi kawasan kumuh	15 (50%)	15 (50%)	-	30
4	Melibatkan masyarakat dalam pembentukan program	10 (33%)	20 (67%)	-	30
5	Masyarakat senang dengan adanya program ini	20 (67%)	10 (33%)	-	30
6	Sudah melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	18 (60%)	12 (40%)	-	30
7	Tempat sosialisasi program dengan masyarakat dilakukan	15 (50%)	15 (50%)	-	30
8	Sering melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	6 (20%)	14 (47%)	10 (33%)	30
9	Mengetahui apa yang dibahas dalam sosialisasi program	12 (40%)	16 (53%)	2 (7%)	30
Jumlah		120	132	18	270
Rata-rata		13	15	2	30
Persentase		43%	50%	7%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator efektivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 43%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator



efektivitas sudah cukup baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden masyarakat di kawasan permukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator efektivitas, dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pendapat Bapak mengenai kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Apakah masyarakat turut berpartisipasi dan antusias dalam mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Dari segi Efektivitas, apakah Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah baik, cukup baik, atau masih kurang baik? Beliau menjawab :

*“Kawasan kumuh di kota pekanbaru tergolong banyak, ada 8 kawasan, yaitu yang terdiri dari 16 kelurahan. Jumlahnya mencapai 113,56 Ha yang terbagi dalam 5 (Lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Limapuluh. Adapun langkah kami selaku dinas yang bertanggung jawab menangani permasalahan Kawasan permukiman kumuh, kami membuat program yang Namanya Program Lingkungan Sehat Perumahan. Program ini bertujuan untuk membrantas lingkungan Kawasan kumuh di kota pekanbaru. Dan alhamdulillah dari hasil program ini, telah teratasi Kawasan kumuh sebanyak 50 persen. Artinya dari keseluruhan luas Kawasan kumuh, kami sudah menangani separuhnya. Yang jelas dari segi efektivitas, Program Lingkungan Sehat Perumahan ini sudah cukup baik dalam mengatasi Kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru”. (Wawancara : Senin, 1 April 2019).*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator efektivitas, peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Pemukiman telah membuat program Lingkungan Sehat Perumahan. Program ini digadang-gadangkan dapat mengatasi permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru. Langkah-langkah dari program ini yaitu diawali dengan melakukan Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman cenderung kumuh, kemudian dilakukan kegiatan pengendalian kawasan pemukiman kumuh, setelah itu dilakukan Penataan dan pembangunan kawasan pemukiman kumuh, kemudian dilakukan Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman kumuh.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator efektivitas sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator efektivitas. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini :

**Tabel V.9 : Data Sekunder Indikator Efektivitas Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bahan	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengukuran dan pasang patok	Kayu 5/7	M3	0,0018	1.400.000	2.520
		Paku kayu	Kg	0,0120	18.000	216
2	Pengukuran dan pasang bouplank	Kayu 5/7	M3	0,0120	1.400.000	16.800
		Paku 5-7 cm	Kg	0,0200	16.000	320
		Papan 3/20 cm	M3	0,0070	1.400.000	9.800

1	2	3	4	5	6	7
3	Pengurugan dengan pasir urug	Pasir urug	M3	1,2000	80.000	96.000
4	Bekisting lantai beton biasa menggunakan kayu 3/20	Papan 3/20 cm	M3	0,0070	1.400.000	9.800
		Kayu 5/7	M3	0,0150	1.400.000	21.000
		Paku 5-7 cm	Kg	0,3000	16.000	4.800
		Minyak bekisting	Ltr	0,2000	5.000	1.000
5	Pembesian 100 Kg jaring kawat (wire mesh)	Wire mesh M-8	Kg	102,0000	10.000	1.020.000
		Kawat ikat beton (bendrat)	Kg	0,5000	18.000	9.000
6	Beton menggunakan ready mix K-250	Ready mix K-250	M3	1,0200	935.000	953.700
7	Beton menggunakan ready mix K-225	Ready mix K-225	M3	1,0200	850.000	867.000
8	Bongkar beton dengan jack hammer	Jack hammer	Sewa-hari	0,2500	250.000	62.500
9	Pasang kayu cerucuk dia 8-10 cm	Kayu cerucuk dia 8-10 cm	M'	1.0000	6.250	6.250
10	Pasang plastik alas	Plastik alas	M2	1.0000	3.500	3.500

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Pekanbaru

Berdasarkan tabel V.9 diatas mengenai data sekunder indikator efektivitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru telah melakukan kontrak kerja dengan CV. Matahari Riau Berjaya. Dalam merealisasikan Program Lingkungan Sehat Perumahan ini, adapun jenis

kegiatannya yaitu melakukan Pengukuran dan pasang patok, Pengukuran dan pasang bouplank, Pengurugan dengan pasir urug, Bekisting lantai beton biasa menggunakan kayu 3/20, Pembesian 100 Kg jaring kawat (wire mesh), Beton menggunakan ready mix K-250 dan K-225, Bongkar beton dengan jack hammer, Pasang kayu cerucuk dia 8-10 cm, dan Pasang plastik alas. Sehingga wajar saja jika indikator efektivitas pada penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan rata-rata 19 (50%).

## **2. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai, sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Kecukupan dalam penelitian ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas program lingkungan sehat perumahan dalam memuaskan kebutuhan masyarakat, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan program Lingkungan Sehat Perumahan pada lokasi permukiman kumuh di Kota

Pekanbaru, dan Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator kecukupan, dapat dilihat pada tabel V.10 sebagai berikut:

**Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan program lingkungan sehat di lokasi	8 (100%)	-	-	8
2	Program tersebut dapat mengatasi permasalahan	4 (50%)	4 (50%)	-	8
3	Program tersebut sudah berjalan secara efektif	4 (50%)	4 (50%)	-	8
4	Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program	4 (50%)	4 (50%)	-	8
5	Masyarakat sudah merasakan manfaat dari program	8 (100%)	-	-	8
6	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat	4 (50%)	4 (50%)	-	8
7	Seberapa sering pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan	2 (25%)	6 (75%)	-	8
8	Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat bagus	4 (50%)	4 (50%)	-	8
9	Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pembinaan	2 (25%)	6 (75%)	-	8
10	Pelaksanaan pembinaan sudah berjalan secara efektif	2 (25%)	6 (75%)	-	8
Jumlah		40	40	-	80
Rata-rata		4	4	-	8
Persentase		50%	50%	0%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator kecukupan, jumlah nilai



keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 50%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator kecukupan sudah baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator kecukupan yang terdiri dari dua sub indikator, dengan sepuluh item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.11 berikut ini :

**Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan program lingkungan sehat di lokasi	20 (67%)	10 (33%)	-	30
2	Program tersebut dapat mengatasi permasalahan	10 (33%)	12 (40%)	8 (27%)	30
3	Program tersebut sudah berjalan secara efektif	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30
4	Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program	12 (40%)	12 (40%)	6 (20%)	30
5	Masyarakat sudah merasakan manfaat dari program	20 (67%)	8 (27%)	2 (6%)	30
6	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat	12 (40%)	14 (47%)	4 (13%)	30

1	2	3	4	5	6
7	Seberapa sering pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan	8 (27%)	12 (40%)	10 (33%)	30
8	Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat bagus	6 (20%)	12 (40%)	12 (40%)	30
9	Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pembinaan	10 (33%)	9 (30%)	11 (37%)	30
10	Pelaksanaan pembinaan sudah berjalan secara efektif	6 (20%)	9 (30%)	15 (50%)	30
Jumlah		112	116	72	300
Rata-rata		11	12	7	30
Persentase		37%	40%	23%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator kecukupan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 37%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 23%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator kecukupan dikategorikan cukup baik dengan persentase 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden masyarakat.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator kecukupan, dengan pertanyaan sebagai berikut: Ada berapa titik lokasi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru? Apakah Dinas Perumahan Rakyat sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh? Apakah hasil dari program

“Lingkungan Sehat Perumahan” ini sudah bisa mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Dari segi Kecukupan, apakah Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah baik, cukup baik, atau masih kurang baik?

Beliau menjawab :

*“Kawasan kumuh di kota pekanbaru ada delapan kawasan, yaitu terdiri dari kawasan lembah damai, kawasan rumbai pesisir, kawasan kota lama, kawasan meranti, kawasan pesisir, kawasan sungai sago, Kawasan sumahilang, dan kawasan padang terubuk. Jumlah luas keseluruhannya yaitu 113,56 Ha. Dari delapan Kawasan tersebut, kewenangan kami hanya menangani dua Kawasan, yaitu Kawasan sumahilang dan Kawasan padang terubuk. Adapun langkah kami selaku dinas yang bertanggung jawab menangani permasalahan Kawasan pemukiman kumuh, kami membuat program yang namanya Program Lingkungan Sehat Perumahan. Dalam program ini kami membangun drainase dan hydrant kebakaran. Sebelum melakukan pembangunan, kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat, yakni melakukan inventarisir terhadap masyarakat sekitar yang memiliki kemauan serta kemampuan kerja agar masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Selain itu juga kami berpesan kepada masyarakat agar dapat menjaga lingkungan yaitu dengan memelihara pembangunan yang telah dibangun dan tidak membuang sampah sembarangan. Hasil dari program ini sudah dirasakan masyarakat, yakni tidak lagi banjir ketika hujan turun. Yang pasti dari segi kecukupan, Program Lingkungan Sehat Perumahan ini sudah cukup baik dalam mengatasi Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru”.* (Wawancara : Senin, 1 April 2019).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator kecukupan, peneliti melihat bahwa dalam merealisasikan program lingkungan sehat perumahan, dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kota Pekanbaru membangun drainase dan hydrant kebakaran. Sebelum melakukan pembangunan, pihak dinas terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat, yakni melakukan inventarisir terhadap masyarakat sekitar yang memiliki kemauan serta kemampuan kerja agar masyarakat terlibat dalam



pembangunan tersebut. Hasil dari program ini sudah dirasakan masyarakat, yakni tidak lagi banjir ketika hujan turun di kelurahan padang terubuk, namun kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih kurang, sehingga lingkungan masih terlihat kotor dan kurang bersih.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator kecukupan berada dalam kategori cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator kecukupan. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel V.12 berikut ini :

**Tabel V.12 : Data Sekunder Indikator Kecukupan Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bahan	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lantai kerja setara 1PC : 3PB : 5Kr (K-175)	Semen portland	Kg	200,0000	1.200	240.000
		Pasir beton	M3	0,5220	135.000	70.470
		Kerikil	M3	0,8620	165.000	142.230
2	Saluran terbuka U Ditch 40x40 cm	U Ditch 40x40 cm	M'	1,0000	750.000	750.000
3	Saluran terbuka U Ditch 50x50 cm	U Ditch 50x50 cm	M'	1,0000	1.250.000	1.250.000
4	Saluran terbuka U Ditch 100x100 cm	U Ditch 100x100 cm	M'	1,0000	2.500.000	2.500.000



1	2	3	4	5	6	7
5	Saluran box culvert 100x100 cm	Box culvert 100x100 cm	M'	1,0000	750.000	750.000
6	Saluran box culvert 150x150 cm	Box culvert 150x150 cm	M'	1,0000	1.500.000	1.500.000
7	Saluran box culvert 250x200 cm	Box culvert 250x200 cm	M'	1,0000	2.250.000	2.250.000
8	Kerb pracetak	Kerb pracetak	M'	1,6670	85.000	141.695
9	Pemasangan terali besi strip (2x3) mm	Besi strip	Kg	6,1770	15.000	92.655
		Pengelasan	Cm	27,0800	7.500	203.100
10	Pemasangan batu andesit	Batu tempel hitam	M2	1,1000	185.000	203.500
		Semen portland	Kg	11,7500	1.200	14.100
		Pasir pasang	M3	0,0350	120.000	4.200

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Pekanbaru

Berdasarkan tabel V.12 diatas mengenai data sekunder indikator kecukupan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru telah melakukan kontrak kerja dengan CV. Matahari Riau Berjaya. Dalam merealisasikan Program Lingkungan Sehat Perumahan ini, adapun jenis kegiatannya yaitu membuat Lantai kerja setara 1PC : 3PB : 5Kr (K-175), Saluran terbuka U Ditch 40x40 cm, 50x50 cm, dan 50x50 cm, Saluran box culvert 100x100 cm, 150x150 cm, dan 250x200 cm, Kerb pracetak, Pemasangan terali besi strip (2x3) mm, dan Pemasangan batu andesit. Sehingga wajar saja jika indikator kecukupan pada penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan rata-rata 16 (42%).

### **3. Pemerataan**

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan efisien apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan program Lingkungan Sehat Perumahan dilakukan secara merata di seluruh lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator pemerataan, dapat dilihat pada tabel V.13 berikut:

**Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan program sudah dilakukan secara merata	4 (50%)	4 (50%)	-	8
2	Pelaksanaan program hanya dilakukan di lokasi darurat	6 (75%)	2 (25%)	-	8
3	Melakukan penataan dan pembangunan di lokasi	8 (100%)	-	-	8
4	Masyarakat dipungut biaya dalam penataan pembangunan	8 (100%)	-	-	8
5	Pembangunan seperti apa yang dibuat oleh dinas	6 (75%)	2 (25%)	-	8
6	Pembangunan yang sudah dibuat tersebut bermanfaat	8 (100%)	-	-	8
7	Pembangunan tersebut menghabiskan biaya besar	4 (50%)	4 (50%)	-	8
Jumlah		60	12	-	72
Rata-rata		6	2	-	8
Persentase		75%	25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.13 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator pemerataan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator pemerataan sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis

pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator pemerataan yang terdiri dari dua sub indikator, dengan tujuh item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.14 berikut ini :

**Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan program sudah dilakukan secara merata	12 (40%)	8 (27%)	10 (33%)	30
2	Pelaksanaan program hanya dilakukan di lokasi darurat	10 (33%)	14 (47%)	6 (20%)	30
3	Melakukan penataan dan pembangunan di lokasi	18 (60%)	8 (27%)	4 (13%)	30
4	Masyarakat dipungut biaya dalam penataan pembangunan	6 (20%)	12 (40%)	12 (40%)	30
5	Pembangunan seperti apa yang dibuat oleh dinas	8 (27%)	16 (53%)	6 (20%)	30
6	Pembangunan yang sudah dibuat tersebut bermanfaat	20 (67%)	8 (27%)	2 (6%)	30
7	Pembangunan tersebut menghabiskan biaya besar	8 (27%)	12 (40%)	10 (33%)	30
Jumlah		82	78	50	210
Rata-rata		12	11	7	30
Persentase		40%	37%	23%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.14 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator pemerataan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan



jumlah persentase 40%, cukup baik dengan jumlah persentase 37%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 23%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator pemerataan sudah cukup baik dengan persentase 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator pemerataan, dengan pertanyaan sebagai berikut: Menurut Bapak apakah kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat dihapuskan? Apakah program “Lingkungan Sehat Perumahan” sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana? Apakah Dinas Perumahan Rakyat sudah melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Dari segi Pemerataan, apakah Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah baik, cukup baik, atau masih kurang baik? Beliau menjawab :

*“Kawasan kumuh bisa saja dihapuskan, namun butuh proses yang lama dan modal yang besar. Selain itu juga seluruh pihak harus bekerjasama dalam mewujudkan hal tersebut. Dan yang paling terpenting adalah dari masyarakat, karena apabila masyarakat tidak bisa diajak kompromi atau menerapkan pola hidup yang kurang sehat dan tidak menjaga lingkungan, maka kawasan kumuh tidak akan dapat dihapuskan. Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, karena selama dilakukannya pembangunan pada tahun 2018, telah diatasi kawasan kumuh setengahnya, meskipun belum seluruhnya, setidaknya sudah mengurangi. Kami juga sudah melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.*

*Yang pasti dari segi Pemerataan, Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah terlaksana dengan cukup baik”. (Wawancara : Senin, 1 April 2019).*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator pemerataan, peneliti melihat bahwa realisasi program lingkungan sehat perumahan sudah cukup baik, namun belum rata. Karena pembangunan yang sudah dilakukan hanya sebagian saja, belum seluruhnya. Perlu diketahui bahwa dari delapan kawasan kumuh yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru hanya mempunyai wewenang penanganan terhadap dua kawasan saja, yakni kawasan Sumahilang dan kawasan Padang Terbuk. Sedangkan penanganan terhadap enam kawasan lainnya merupakan kewenangan Pusat dan kewenangan Provinsi.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator pemerataan sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator pemerataan. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel V.15 berikut ini :

**Tabel V.15: Data Sekunder Indikator Pemerataan Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bahan	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemasangan koral sikat	Semen portland	Kg	11,7500	1.200	14.100
		Pasir cor	M3	0,0350	135.000	4.725
		Koral sikat	M3	13,0900	165.000	242.165
		Coating	Ltr	0,1800	62.000	11.160
2	Pemasangan pattern concrete	Semen portland	Kg	29,6800	1.200	35.616
		Pasir cor	M3	0,0398	135.000	5.373
		Colour hardener	Kg	3,5000	15.000	52.500
		Realese agent	Kg	0,3000	17.500	5.250
		Coating	Ltr	0,1500	62.000	9.300
3	Pekerjaan lampu jalan	Solar panel 80WP 12 V/10 A	Unit	1,0000	3.500.000	3.500.000
		Box battery	Unit	1,0000	4.500.000	4.500.000
		Controller	Unit	1,0000	3.850.000	3.850.000
		Battery 65 Ah/12 V VRLA / MF	Unit	1,0000	3.500.000	3.500.000
		Lampu LED 20 watt putih	Set	1,0000	650.000	650.000
		Kabel, aksesoris, skun, clamp	Set	1,0000	750.000	750.000
		Tiang PJU T.7 M	Unit	1,0000	7.000.000	7.000.000
4	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	Besi beton (polos / ulir)	Kg	10,5000	10.000	105.000

1	2	3	4	5	6	7
		Kawat ikat beton (bendrat)	Kg	0,1500	18.000	2.700
5	Membuat 1 M' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm	Waterstop lebar 230 mm- 320 mm	M'	1,0000	750.000	750.000
6	Membuat 1 M3 pondasi beton bertulang (150 Kg besi + bekisting)	Kayu kelas III	M3	0,2000	1.400.000	280.000
		Paku 5-7 cm	Kg	1,5000	16.000	24.000
		Minyak bekisting	Ltr	0,4000	5.000	2.000
		Besi beton ulir	Kg	157,5000	11.200	1.764.000
		Kawat ikat beton (bendrat)	Kg	2,2500	18.000	40.500
		Semen Portland	Kg	336,0000	1.200	403.200
		Pasir beton	M3	0,5400	135.000	72.900
		Kerikil	M3	0,8100	165.000	133.650
7	Membuat 1 M3 kolom beton bertulang (200 Kg besi + bekisting)	Kayu kelas III	M3	0,3200	1.400.000	448.000
		Paku 5-7 cm	Kg	3,2000	16.000	51.200
		Minyak bekisting	Ltr	1,6000	5.000	8.000
		Besi beton ulir	Kg	210,0000	11.200	2.352.000
		Kawat ikat beton (bendrat)	Kg	3,0000	18.000	54.000

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



1	2	3	4	5	6	7
		Semen Portland	Kg	336,0000	1.200	403.200
		Pasir beton	M3	0,5400	135.000	72.900
		Kerikil	M3	0,8100	165.000	133.650
		Kayu kelas II balok	M3	0,1400	2.000.000	280.000
		Plywood 9 mm	Lbr	2,8000	150.000	420.000
		Kayu cerucuk dia 8-10 cm/meter	Btg	16,0000	25.000	400.000

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Pekanbaru

Berdasarkan tabel V.15 diatas mengenai data sekunder indikator pemerataan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru telah melakukan Pemasangan koral sikat atau beton sikat. Koral sikat berfungsi untuk membuat lantai menjadi tidak licin dan tidak becek, kemudian juga bisa digunakan untuk menambah keindahan halaman depan rumah. Koral sikat dapat dilihat pada foto dokumentasi nomor 8. Kemudian juga dilakukan pemasangan pattern concrete atau beton bercetak. Ini digunakan untuk teras, trotoar, jalan masuk dan lantai interior.

Selain itu juga dilakukan pekerjaan pemasangan lampu jalan, hal ini dibuat supaya jalan di Kelurahan Padang Terubuk menjadi tidak gelap ketika malam hari, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak merasa takut ketika keluar rumah. Kemudian juga dilakukan pembesian dengan besi polos atau besi ulir, Membuat 1 M' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm, Membuat 1 M3 pondasi beton bertulang (150 Kg besi+bekisting), dan Membuat 1 M3 kolom beton bertulang (200 Kg besi+bekisting). Sehingga wajar saja jika indikator

pemerataan pada penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pemerataan dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan rata-rata 18 (47%).

#### **4. Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan dalam program lingkungan sehat perumahan ini dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika program ini akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak dari program ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator responsivitas, dapat dilihat pada tabel V.16 berikut:

**Tabel V.16: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan	4 (50%)	4 (50%)	-	8
2	Kinerja pegawai Dinas pemukiman sudah baik	4 (50%)	4 (50%)	-	8
3	Bersikap ramah dengan masyarakat	6 (75%)	2 (25%)	-	8
4	Melakukan tindakan pencegahan	8 (100%)	-	-	8
5	Seperti apa yang dilakukan untuk mencegah	4 (50%)	4 (50%)	-	8
6	Sudah merasakan manfaat dari tindakan pencegahan	8 (100%)	-	-	8
Jumlah		34	14	-	48
Rata-rata		6	2	-	8
Persentase		75%	25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.16 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator responsivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator responsivitas

sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator responsivitas yang terdiri dari dua sub indikator, dengan enam item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.17 berikut ini :

**Tabel V.17: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan	12 (40%)	18 (60%)	-	30
2	Kinerja pegawai Dinas pemukiman sudah baik	14 (47%)	10 (33%)	6 (20%)	30
3	Bersikap ramah dengan masyarakat	15 (50%)	15 (50%)	-	30
4	Melakukan tindakan pencegahan	10 (33%)	20 (67%)	-	30
5	Seperti apa yang dilakukan untuk mencegah	20 (67%)	10 (33%)	-	30
6	Sudah merasakan manfaat dari tindakan pencegahan	18 (60%)	12 (40%)	-	30
Jumlah		81	93	6	180
Rata-rata		13	16	1	30
Persentase		44%	53%	3%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.17 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator responsivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan



jumlah persentase 44%, cukup baik dengan jumlah persentase 53%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 3%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator responsivitas sudah cukup baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator responsivitas, dengan pertanyaan sebagai berikut: Apa dampak negatif dari kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Dalam 5 tahun terakhir, apakah angka kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru ada penurunan atau justru lebih meningkat? Apakah ada tindakan pencegahan lain untuk menekan perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru? Dari segi Responsivitas, apakah Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah baik, cukup baik, atau masih kurang baik? Beliau menjawab :

*“Dampak negatif dari kawasan permukiman kumuh ini banyak sekali, seperti menimbulkan berbagai macam penyakit, demam berdarah, sarang nyamuk, rumah tidak teratur, bau busuk, lingkungan kotor, jorok, dan masih banyak lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini angka kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru terus meningkat, namun setelah diberlakukan program lingkungan sehat perumahan sekarang alhamdulillah ada penurunan. Tindakan pencegahan lain ada yaitu sosialisasi dengan masyarakat agar menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong seminggu sekali. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita ini rata-rata pemalas dan susah dikasih tau, bandel, sehingga tetap saja masih banyak lingkungan yang*

*tidak dijaga kebersihannya. Kalau dari segi responsivitas, program lingkungan sehat perumahan ini sudah cukup baik, karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru.”. (Wawancara : Senin, 1 April 2019).*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator responsivitas, peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan pemukiman kumuh, yaitu dengan membuat dan merealisasikan program lingkungan sehat perumahan di Kelurahan Padang Terbuk. Masyarakat sangat senang dan mengapresiasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman karena telah melakukan pembangunan untuk mengatasi pemukiman kumuh dilingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu juga masyarakat turut bangga karena telah di ikutsertakan dalam proses merealisasikan pembangunan drainase, pedestrian dan hydrant kebakaran. Yaitu dengan merekrut masyarakat yang mau bekerja dan memiliki kemampuan dan keahlian untuk manjadi bagian dari pekerja dalam membuat pembangunan tersebut.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator responsivitas sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator responsivitas. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel V.18 berikut ini :

**Tabel V.18: Data Sekunder Indikator Responsivitas Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bahan	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemasangan 1 M2 bekisting untuk lantai	Kayu kelas III	M3	0,0400	1.400.000	56.000
		Paku 5-7 cm	Kg	0,4000	16.000	6.400
		Minyak bekisting	Ltr	0,2000	5.000	1.000
		Kayu kelas II balok	M3	0,0150	2.000.000	30.000
		Plywood 9 mm	Lbr	0,3500	150.000	52.500
		Kayu cerucuk dia 8-10 cm	Btg	6,0000	25.000	150.000
2	Pemasangan lantai ubin guiding block ukuran 30 cm x 30 cm	Ubin ukuran 30 cm x 30 cm	Bh	11,8700	1.500	17.805
		Semen Portland	Kg	10,0000	1.200	12.000
		Pasir pasang	M3	0,0450	120.000	5.400
3	Pemasangan hydrant kebakaran 4"	Fire hydrant pilar two way 4"-2,5x2,5 Macino	Bh	1,0000	6.500.000	6.500.000
		Pipa PVC 4"	M'	6,0000	250.000	1.500.000
		Tee PVC 6x4	Bh	1,0000	500.000	500.000
		G Joint 6"	Bh	2,0000	350.000	700.000
		Plange spigot 4"	Bh	5,0000	275.000	1.375.000
		G Valve 4"	Bh	1,0000	650.000	650.000

1	2	3	4	5	6	7
		Baut 5/8	Bh	20,0000	800	16.000
		Karet paking	Bh	5,0000	35.000	175.000
		Elbow 4"	Bh	5,0000	127.500	637.500
		Lem pipa PVC	Kg	1,0000	15.000	15.000

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Pekanbaru

Berdasarkan tabel V.18 diatas mengenai data sekunder indikator responsivitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru telah melakukan kontrak kerja dengan CV. Matahari Riau Berjaya. Dalam merealisasikan Program Lingkungan Sehat Perumahan ini, adapun jenis kegiatannya yaitu melakukan Pemasangan 1 M2 bekisting untuk lantai, Pemasangan lantai ubin guiding block ukuran 30 cm x 30 cm, dan Pemasangan hydrant kebakaran 4". Sehingga wajar saja jika indikator responsivitas pada penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian "cukup baik" dengan rata-rata 19 (50%). Sesuai dengan penjelasan diawal bahwa skala 34-66% masuk dalam kategori cukup baik.



## 5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program lingkungan sehat perumahan dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah langkah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari langkah yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman cenderung kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator ketepatan, dapat dilihat pada tabel V.19 berikut:

**Tabel V.19: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	sudah melakukan perencanaan dan pendataan	8 (100%)	-	-	8
2	tempat yang ditetapkan tersebut sudah tepat	6 (75%)	2 (25%)	-	8
3	Pegawai sudah pengalaman dalam bekerja	6 (75%)	2 (25%)	-	8
4	Sudah melakukan pendataan dan perencanaan	8 (100%)	-	-	8
5	Lokasi yang ditetapkan tersebut sudah tepat	6 (75%)	2 (25%)	-	8
6	Pegawai yang bertugas mendata sudah pengalaman	6 (75%)	2 (25%)	-	8

1	2	3	4	5	6
7	Angka kawasan permukiman kumuh menurun	4 (50%)	4 (50%)	-	8
	Jumlah	44	12	-	56
	Rata-rata	6	2	-	8
	Persentase	75%	25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.19 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator ketepatan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator ketepatan yang terdiri dari dua sub indikator, dengan tujuh item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.20 berikut ini :

**Tabel V.20: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sudah melakukan perencanaan dan pendataan	20 (67%)	10 (33%)	-	30
2	Tempat yang ditetapkan tersebut sudah tepat	14 (47%)	10 (33%)	6 (20%)	30
3	Pegawai sudah pengalaman dalam bekerja	15 (50%)	15 (50%)	-	30
4	sudah melakukan pendataan dan perencanaan	20 (67%)	10 (33%)	-	30
5	Lokasi yang ditetapkan tersebut sudah tepat	20 (67%)	10 (33%)	-	30
6	Pegawai yang bertugas mendata sudah pengalaman	18 (60%)	12 (40%)	-	30
7	angka kawasan permukiman kumuh menurun	15 (50%)	15 (50%)	-	30
Jumlah		122	82	6	210
Rata-rata		16	12	2	30
Persentase		53%	40%	7%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.20 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator ketepatan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 53%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan sudah cukup baik dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil

kuisisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator ketepatan, dengan pertanyaan sebagai berikut: Dari segi Ketepatan, apakah Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah baik, cukup baik, atau masih kurang baik? Dalam penelitian ini ada 3 kategori untuk menilai “Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru”. Apakah sudah baik, cukup baik, atau masih kurang baik? Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru? Apa saran Bapak untuk pegawai dinas dan masyarakat agar kedepannya kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru ini bisa diatasi atau bahkan dihilangkan secara bersama-sama, sehingga tercipta lingkungan yang sehat? Beliau menjawab:

*“Kalau menurut saya dari segi ketepatan, Program Lingkungan Sehat Perumahan ini sudah cukup baik dan sudah tepat. Karena program ini telah direalisasikan di tempat dimana memang sesuai dengan kebutuhan. Karena kewenangan dinas kami kan menangani dua kawasan, yakni kawasan padang terubuk dan kawasan sumahilang. Dan untuk tahun 2018 kami telah membangun di kawasan padang terubuk. Kemudian untuk tahun 2019 ini kami akan melakukan pembangunan di kawasan sumahilang. Kemudian menilai Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, karena sudah terealisasi di satu kawasan, yakni kawasan padang terubuk. Kemudian kalau untuk faktor penghambatnya itu adalah dari segi anggaran. Selain itu faktor masyarakat nya yang kurang peduli dengan lingkungan, seperti tidak membudayakan gotong royong, buang sampah sembarangan, dan*



*sebagainya. Padahal kami sudah sering mengingatkan untuk menciptakan pola hidup sehat, baik melalui sosialisasi maupun melalui papan peringatan". (Wawancara : Senin, 1 April 2019).*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator ketepatan, peneliti melihat bahwa program lingkungan sehat perumahan yang direalisasikan pada tahun 2018 di Kelurahan Padang Terubuk sudah tepat dan sudah terlaksana dengan cukup baik. Karena kelurahan padang terubuk merupakan salah satu dari delapan kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru. Dari delapan kawasan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman memiliki kewenangan untuk menangani dua kawasan yaitu kawasan padang terubuk dan kawasan sumahilang. Enam kawasan lainnya merupakan kewenangan penanganan pusat dan provinsi. Kemudian untuk tahun 2019, program lingkungan sehat perumahan akan di realisasikan di kawasan Sumahilang.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator ketepatan. Adapun data sekunder tersebut dapat dilihat pada tabel V.21 berikut ini :

**Tabel V.21: Data Sekunder Indikator Ketepatan Dalam Penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Peralatan	Bahan	Pelaksana
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembongkaran Beton</li> <li>- Galian Tahan</li> <li>- Urugan Pasir dan Lantai</li> <li>- Saluran U-Ditch</li> <li>- Bekisting Lantai Beton</li> <li>- Pembesian</li> <li>- Cor Beton K-225</li> <li>- Pemasangan Pattren Concrete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jack Hummer</li> <li>• Dump Truck</li> <li>• Pick Up</li> <li>• Cangkul</li> <li>• Sekop</li> <li>• Concrete Mixer/Molen</li> <li>• Pompa Air</li> <li>• Gerobak</li> <li>• Martil</li> <li>• Kakatua</li> <li>• Gergaji</li> <li>• Kunci besi</li> <li>• Gunting besi</li> <li>• Alat bantu lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semen Portland</li> <li>• Pasir Beton</li> <li>• Kerikil Beton</li> <li>• Pasir Urug</li> <li>• Air</li> <li>• Sika Mortar</li> <li>• Balok Kayu</li> <li>• Paku</li> <li>• Kawat Beton</li> <li>• Minyak Bekist</li> <li>• Wire Mesh M8</li> <li>• Colour harder</li> <li>• Releas powder</li> <li>• Coating</li> <li>• Bahan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandor</li> <li>• Kepala Tukang</li> <li>• Tukang Batu</li> <li>• Tukang Kayu</li> <li>• Tukang Besi</li> <li>• Pekerja</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Hydrant Kebakaran</li> <li>- Pembuatan Pagar Hydrant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cangkul</li> <li>• Sekop</li> <li>• Pompa air</li> <li>• Gerobak</li> <li>• Alat bantu lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fire Hydrant</li> <li>• Pipa PVC</li> <li>• Tee PVC</li> <li>• G Joint</li> <li>• Flange Spigot</li> <li>• G Valve</li> <li>• Baut 5/8</li> <li>• Karet Paking</li> <li>• Elbow</li> <li>• Lem Pipa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandor</li> <li>• Pekerja</li> </ul>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh Pekanbaru

Berdasarkan tabel V.21 diatas mengenai data sekunder indikator ketepatan, pembangunan yang dibuat di Kawasan padang terubuk adalah pembangunan drainase dan pedestrian serta hydrant kebakaran. Dalam melakukan pembangunan tersebut, adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu Mandor, Kepala Tukang, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Besi dan Pekerja. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan yaitu pembongkaran beton, penggalian tahan, urugan pasir dan lantai,

saluran u-ditch, bekisting lantai beton, pembesian, cor beton K-225, pemasangan patten concrete, pemasangan hydrant kebakaran dan pagar hydrant. Semua kegiatan pekerjaan tersebut menggunakan bahan-bahan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga wajar saja jika indikator ketepatan pada penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan dalam penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan rata-rata 19 (50%).

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden pegawai mengenai Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.22 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Efektivitas	6 (75%)	2 (25%)	0 (%)	8
2	Kecukupan	4 (50%)	4 (50%)	0 (%)	8

1	2	3	4	5	6
3	Pemerataan	6 (75%)	2 (25%)	0 (%)	8
4	Responsivitas	6 (75%)	2 (25%)	0 (%)	8
5	Ketepatan	6 (75%)	2 (25%)	0 (%)	8
Jumlah		28	12	0	40
Rata-rata		6	2	0	8
Persentase		75%	25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan, 2019.

Dari tabel V.22 rekapitulasi tanggapan responden pegawai terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 75% (6 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 25% (2 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 0% (0 responden), dari total keseluruhan responden pegawai sebanyak 8 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Baik Dengan total persentase sebesar 75% (6 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik, artinya semua indikator sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat mengenai Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.23 berikut ini :



**Tabel V.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	13 (43%)	15 (50%)	2 (7%)	30
2	Kecukupan	11 (37%)	12 (40%)	7 (23%)	30
3	Pemerataan	12 (40%)	11 (37%)	7 (23%)	30
4	Responsivitas	13 (44%)	16 (53%)	1 (3%)	30
5	Ketepatan	16 (53%)	12 (40%)	2 (7%)	30
Jumlah		65	66	19	150
Rata-rata		13	13	4	30
Persentase		43%	43%	14%	100%

Sumber : Data Olahan, 2019.

Dari tabel V.23 rekapitulasi tanggapan responden masyarakat terhadap Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 43% (13 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 43% (13 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 14% (4 responden), dari total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 30 orang. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 43% (13 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik, artinya semua indikator belum terlaksana dengan baik.

### **C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru jarang melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai program lingkungan sehat dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu masih ada beberapa rumah yang terkena banjir ketika hujan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan masih rendah, yakni suka membuang sampah sembarangan dan tidak pernah melakukan gotong royong bersama. Sehingga menyebabkan sampah berserakan, lingkungan menjadi kotor dan tidak bersih. Selain itu beberapa besi penutup drainase banyak di curi oleh masyarakat yang nakal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan lima indikator yaitu, Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan, dengan itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari seluruh jawaban responden pegawai dan masyarakat pada indikator variabel Efektivitas dengan item penilaian Pembentukan program Lingkungan Sehat Perumahan dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan sosialisasi program Lingkungan Sehat Perumahan dengan masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan persentase 50% yang terletak pada kategori 34%-66%.
2. Dari seluruh jawaban responden pegawai dan masyarakat pada indikator variabel Kecukupan dengan item penilaian Pelaksanaan program Lingkungan Sehat Perumahan pada lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal

di permukiman kumuh dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan persentase 42% yang terletak pada kategori 34%-66%.

3. Dari seluruh jawaban responden pegawai dan masyarakat pada indikator variabel Pemerataan dengan item penilaian Pelaksanaan program Lingkungan Sehat Perumahan dilakukan secara merata di seluruh lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan persentase 47% yang terletak pada kategori 34%-66%.
4. Dari seluruh jawaban responden pegawai dan masyarakat pada indikator variabel Responsivitas dengan item penilaian Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan persentase 50% yang terletak pada kategori 34%-66%.
5. Dari seluruh jawaban responden pegawai dan masyarakat pada indikator variabel Ketepatan dengan item penilaian Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman cenderung kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan persentase 58% yang terletak pada kategori 34%-66%.
6. Dari hasil penelitian Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan



Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru berada pada kategori 50% dari hasil jawaban seluruh responden pegawai dan masyarakat, yang terletak pada kategori 34%-66%.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah:

1. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan padang terubuk mengenai program lingkungan sehat perumahan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga dan merawat pembangunan yang telah diberikan. Sehingga pembangunan yang telah dibuat tidak sia-sia dan program lingkungan sehat perumahan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.
2. Kepada masyarakat di kawasan padang terubuk agar lebih sadar dan peka terhadap kebersihan lingkungan, baik itu kesadaran secara individual untuk tidak membuang sampah sembarangan, maupun secara bergotong-royong membersihkan lingkungan dalam seminggu sekali. Kemudian bersama-sama merawat hasil pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tujuan program lingkungan sehat perumahan untuk mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. G, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al-Hafis, 2015 *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Badrudin, 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hasibuan, Melayu S.P, 2001. *Manajemen (Dasar, Penegertian, dan Masalah)*. Bandung, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara (Revisi Kelima).
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Penerbit Yayasan Realestat Indonesia-PT. Rakasindo, Jakarta.
- Kurniasih, 2007. *Pembangunan Berkelanjutan : Mencari Format Politik*, Jakarta ; Gramedia.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang, Salemba Humanika
- Latief, Abdul, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. UII Press
- Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, PT. Panca Abdi Nugraha.

- Masrun, La Ode. 2009. Permukiman Kumuh. Diakses melalui odehyundo.blogspot.com oleh Muhammad Izzatullah pada 20 Juli 2016.
- Ndaraha Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta, Rineke Cipta
- Rudiyantono, 2008. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES., Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta. Bumi Askara. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta. Bumi Askara
- Siswanto, B, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Sobirin, 2001, Distribusi Permukiman dan Prasarana Kota Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota Indonesia, dalam R.H Koestoer, R.P Tambunan, H.T Budianto, Sobirin, *Dimensi Keruangan Kota Teori Dasar*, UI Press, Jakarta
- Solihin, Ismail, 2010. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Erlangga
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Kencana
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Adminitrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Sistem Admisnsitrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Thoha, Mftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta, Kencana.

Tim Penyusun. 2013. Buku Pedoman Penulisan Penelitian. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Voll, Willy D.S, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

**Dokumentasi :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.